

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai dunia pertambangan, Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah terpenting dalam sejarah Pertambangan timah di Indonesia. Pada tahun 2017 Indonesia tercatat sebagai penghasil timah terbesar setelah china dengan produksi sebesar 69.600 metrik ton atau sekitar 25 persen dari total produksi timah dunia (Indonesian Tin Outlook, 2018). Menurut US Geological survey (2021) Indonesia memiliki sekitar 18,6 persen dari total cadangan timah dunia. Disini yang mana dapat kita simpulkan Kepulauan Bangka Belitung sangatlah berperan penting dalam memainkan peran pada produksi timah dunia. Secara history didalam praktik penambangan timah di Bangk Belitung yang mana setelah kemerdekaan republic Indonesia pada tahun 1953-1958 kebijakan muncul untuk menasionalisasikan seluruh perusahaan asing yang berada pada yurisdiksi Indonesia dengan bertujuan mewujudkan ekonomi nasional yang lebih mandiri.

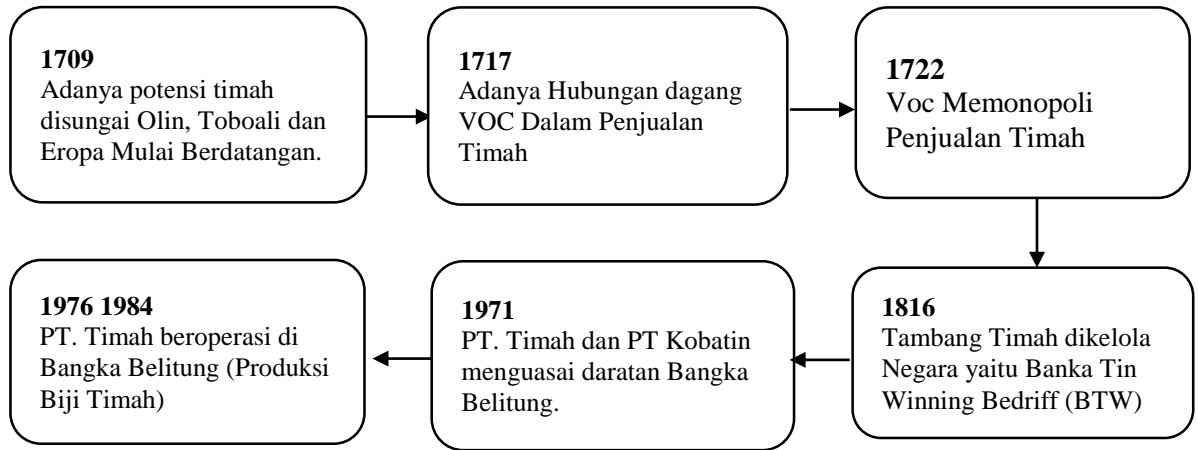
Terdahulu di dalam perjalanannya perusahaan belanda yaitu Gemeenschappelijk Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB), Banka Tijn Winning Bedrif (BTW), serta NV Singkep Tin Exploitatie Maatschappij (NV SITEM) yang berapada pada Yurisdiksi Indonesia, Dinasionalisasi menjadi tiga perusahaan tambang negara terpisah. Selain itu pada tahun 1961 pemerintah membentuk badan Pimpinan Umum perusahaan tambang Tinag negara (BPU PN Tambang Timah) dan lalu ketiganya melebur menjadi Perusahaan Negara Tambang Timah (PN

Tambang Timah) perusahaan ini berjalan menjadi persero dan merubah menjadi PT Timah Tbk yang seluruh saham nya dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia, meski begitu perusahaan ini tidak dikut sertakan dengan kontrol negara pada industri timah hingga masuk nya orde baru. Hingga timah merupakan dianggap komoditas penting yang akhirnya pertambangan dan perdangan timah dipegang oleh pemerintah pusat secara penuh.

Didalam perjalanannya situasi pertambangan timah berubah drastik Ketika pemerintah pusat memutuskan untuk meliberalisasi sektor timah dengan deregulasi perdagangan melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 146 tahun 1999 dengan menyatakan bahwa timah tidak lagi menjadi komoditas strategis. Disini lah mulai gonjang-ganjing perindustrian timah dimulai yang mana munculnya peranan-peranan investor asing serta melemahnya monopoli terhadap pertambangan dan perdagangan sehingga memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mengelola sumber daya alam timah. Ditujukan dengan Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah membawa sngat desentralisasi yang membawa implikasi sejumlah kewenangan pemerintah daerah yang lebih luas dalam mengatur sumber daya alam di daerah tersebut.

Gambar. 1. Alur Timah

Sumber : Arumingtyas dalam (Rumanti, 2023)



Kondisi pada gambar. 1. Dimana engkarut dari pertimmahan yang dimana dimulainya pertambangan di pulau Bangka yang menyebabkan banyak nya pihak luar yang dating ke Bangka untuk dapat menguasai Timah tersebut. Lebih lanjut lagi, menurut data diatas bawasannya dalam persoalan timah yang dilakukan pada tahun 1976 Kota Toboali menghasilkan sebanyak 392,5 ton, tahun 1977 sebanyak 243,5 ton, tahun 1978 sebanyak 36,0 ton, Tahun 1979 sebanyak 326,0 ton, tahun 1980 sebanyak 5480,0 ton, tahun 1981 sebanyak 705,5 ton, tahun 1982 sebanyak 270,0 ton, tahun 1983 sebanyak 799,5 ton dan yang terakhir ditahun 1984 sebanyak 93,5 ton (Rumanti, 2023).

Ruang politik inilah yang akhirnya memunculkan pelaku bisnis, swasta dan masyarakat lokal untuk terlibat secara langsung dalam pertambangan timah dibangka Belitung khususnya di Kabupaten Bangka Selatan. Di sini pemerintah Kabupaten mulai mengeluarkan izin-izin pertambangan skala kecil yang dikelola

masyarakat lokal. Hingga pada tahun 2015 terdapat kurang lebih 1.068 perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan. Jumlah tersebut belum termasuk perusahaan-perusahaan yang masih belum tersertifikasi dan penambang-penambang illegal.

Bangka Belitung sendiri secara geografis terdapat beberapa kota dan kabupaten yakni kabupaten Bangka barat, kabupaten Bangka, kabupaten Bangka tengah, kabupaten Bangka selatan dan kota madya Pangkal pinang. Disini, didalam dampak dan upaya menciptakan lingkungan hidup dan sosial serta sumberdaya alam yang mempuni serta berkelanjutan. Merujuk kepada Kabupaten Bangka Selatan dimana maraknya pertambangan yang muncul baik illegal maupun yang memiliki izin secara langsung dianggap sebagai sebagai penguatan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah daerah meraup hasil sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) didaerah Bangka Selatan. Selama ini pulau Bangka merupakan salah satu yang memiliki kandungan mineral timah yang melimpah. Mengacu pada study kasus di kabupaten Bangka selatan yang dimana memiliki terdapat banyak permasalahan mengenai sivitas keberlangsungan pertambangan laut yang mengakibatkan banyak hal pertama, dalam memicu pertumbuhan ekonomi, kedua dampak sosial, ketiga lingkungan hidup yang memicu kerusakan ekosistem perikanan.

Dalam beberapa hal tersebut, Kabupaten Bangka selatan masih diakui sebagai ladang perekonomian Bangka Belitung dimana, Bangka selatan merupakan kabupaten yang memiliki beberapa sumber kekayaan alam yang mampu menyumbangkan pendapatan terbesar bagi Bangka Belitung, baik dari hal

perikanan, agraria dan pertambangan. Namun dalam perjalanannya, kabupaten Bangka Selatan banyak sekali memiliki kemunduran dari segi kemajuan pembangunan, pendidikan dan lain sebagainya. Selain itu dikota kecil tersebut terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk di teliti, salah satunya adalah masalah pertambangan.

Pertambangan timah di kabupaten Bangka Selatan sangatlah marak, baik di darat maupun di laut bertahun-tahun masyarakat menggali tanah, pembebasan lahan untuk dijadikan tambang, pengoprasian tambang tersebut merupakan didarat dan di laut. Awal mula pertambangan tersebut beropersi didarat namun seiring perkembangan zaman dan menipisnya sumber timah yang berada didarat hal tersebut mulai bergeser menuju laut. Meskipun beberapa penambang memiliki izin yang legal namun hal tersebut memiliki dampak positif dan negatif yang dapat dihasilkan dimana hal positif nya ialah terciptanya suatu lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan menekan angka kemiskinan dan menambah pendapatan pemerintah bangka selatan akan hal tersebut, namun hal yang didapatkan dalam prospek negative ialah rusak nya alam, terumbu karang dan ekosistem laut lainnya, kurangnya pendapatan nelayan terhadap produksi ikan setiap tahun nya sehingga memunculkan konflik antara komoditas nelayan dan tambang (Rismika & Purnomo, 2019).

Maraknya tambang rakyat di seluruh wilayah Bangka Belitung ini bukan semata-mata factor ekonomi saja tetapi jauh karena letupan ketidakpuasan masyarakat atas dikeruknya kandungan bumi mereka oleh orang lain sementara masyarakat hanya menjadi penonton yang baik, dimasa monopoli PT. Timah

dimana masyarakat yang dianggap ikut campur harus menanggung hukuman penjara yang menanti mereka disini dapat dikenali didalam proses penambangan timah terdapat dua jenis proses yaitu penambangan darat dan laut, dimana system metode yang digunakan untuk penambang didarat dilakukan dengan cara menggali tanah lalu disemprotkan dengan menggunakan pompa semprot, pasir dan biji timah akan dialirkan secara langsung melalui peralatan yang disebut sakan, dengan hal tersebut biji timah yang merupakan ada nya perbedaan berat anantara biji timah dan pasir, akan terendap dan terpisah dari pasir. Sedangkan mekanisme tambang laut dengan beberapa metode, dimana menyedot dasar laut atau mengebornya menggunakan kapal isap, kapal keruk, atau T.I apung sederhana (biasa yang dilakukan masyarakat).

Ketika dahulu perusahaan dan masyarakat maraknya membuka pertambangan Timah (T.i) di daratan dengan banyak nya pembebasan lahan serta menggerus hutan-hutan hingga gundul, untuk bagaimana digali menggunakan alat berat sebagai tempat pertambangan maka terjadilah awal mula kerusakan hutan yang sampai hari ini menciptakan tanah yang tandus beserta danau-danau yang tidak bisa digunakan kembali. Selain itu hadir nya perusahaan asing dan PT. Timah pun dalam hal tersebut upaya menimbun (reklamasi) tidak pernah dilakukan sehingga menyebabkan rusaknya alam dimana tambang yang beroperasi menggunakan air sebagai alat penyemprotan yang kemudian air tersebut bercampur lumpur sehingga mengalir kealiran sungai- sungai yang awalnya jernih menjadi keruh dan aliran sungai bermuara kelaut sehingga sedikit banyak

menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan keindahan pantai yang ada dipulau Bangka.

Dulu pantai yang berpasir putih kini menjad abu-abu dan air menjadi kehitam-hitaman kotor dan berlumpur. Tidak hanya sampai disitu ekosistem laut dipantai-pantai yang berdampak besar bisa dilihat langsung seperti hutan mangrove atau hutan bakau yang bagaimana mangrove merupakan ekosistem penyangga pantai yang terdapat pasang surut. Keberadaan hutan mangrove yang sehat diperlakukan oleh biota laut sebagai tempat berkembang biak sehingga akan menentukan banyak tidaknya ikan atau hasil laut yang ditangkap oleh nelayan. Selain itu kita mengamini bahwasannya mangrove juga berguna untuk menangkal abrasi pantai yang di akibatkan gempuran ombak (Agraria et al., 2021).

Besarnya kualitas yang dihasilkan dimana penambang darat berbondong-bondong untuk menuju lautan, dengan daratan yang sudah diobrak-abrik perusahaan besar seperti PT. Timah dan PT Kobatin, sementara itu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ini marak nya pertambangan dikawasan laut atau lepas pantai yang mengakibatkan banyak terjadi masalah terhadap keberlangsungan ekosistem laut, air laut menjadi keruh, lumpur disetiap dasarnya, terumbu karang habis dan lain sebagainya, hal ini juga yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal antar masyarakat, yang dimana dari sisi nelayan sangat dirugikan oleh kubu penambang yang mana nelayanan biasanya menambang dengan jarak yang dekat, serta nelayan udang sungkur yang biasanya menjala di bibir pantai sekarang harus ikhlas dengan keadaan dengan pendapatan yang kurang maksimal dari sebelum-sebelumnya.

Namun untuk nelayan yang menangkap ikan menggunakan kapal harus merogoh kocek yang besar, dengan pergi jauh lagi untuk mencari ikan, dan hasil pun tidak maksimal, disinilah dapat dilihat bahwa pertambangan laut sangat lah merugikan, lalu bagaimana dengan keberlangsungan kehidupan untuk bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan dimasa mendatang. Selain itu ketika dihadapkan dengan problematika yang ada, pertambangan timah di laut dapat memberikan imbas yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi pada saat ini, namun masalah yang dihadapi ialah kerap terjadinya konflik horizontal antar masyarakat di Bangka selatan yang menyebabkan demonstrasi besar-besaran kepada pemerintah. Tidak sampai disitu ketegangan antar nelayan dan penambang timah laut sebenarnya bukan hal yang baru. Aktivitas pertambangan timah laut oleh penambang Inkonvensional telah dilakukan dengan menggunakan ponton apung untuk bagaimana mengeruk biji timah yang ada didasar laut terkadang sudah bernegosiasi dengan nelayan dengan iming bagi hasil sebagai kompensasi karna dianggap mengganggu aktivitas dari pada nelayan. Hal tersebut lebih sering ditolak oleh masyarakat nelayan pantai lebih laut merupakan hal utama yang penting bagi mereka.

Hadir nya kesadaran lingkungan dan ekosistem laut, saat ini banyak sekali penentangan-penentangan terhadap penambangan timah yang berada dilaut karna dianggap merusak ekosistem laut serta membuat pantai-pantai, terumbu karang, dan ekosistem laut lainnya menjadi rusak bagi pelaku wisata. Hal tersebut terkadang disadari oleh masyarakat luas bahwa pertambangan sudah menjadi akar

didalam kehidupan masyarakat Bangka Belitung maka aktivitas pertambangan hari ini disadari dan di toleransi. Sehingga hanya komoditas tertentu yang menggebu dalam kesadarannya seperti nelayan, sehingga konflik dan aksi-aksi muncul untuk bagaimana mengehentikan pertambangan diwilayah laut Bangka Selatan.

Disini masyarakat menuntut untuk bagaimana pemerintah mampu untuk mengatasi konflik tersebut atas dasar tuntutan masyarakat yang pro dan kontra, dikarnakan banyak sekali merugikan masyarakat yang komoditas bukan penambang, selain itu yang menjadi dasar ialah, bagaimana peran pemerintah menghadapi problematika saat ini dengan melihat aspek sosial dan dampak lingkungan yang terjadi akibat pertambangan timah laut tersebut. Hadirnya undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang petambangan mineral dan batu bara (selanjutnya ditulis Minerba) dimana lahirnya undang-undang tersebut dengan sistemnya mampu membawa perbaikan pada dunia pertambangan di tanah air, serta dapat menyempurnakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan pokok-pokok Pertambangan dan mampu mengembalikan fungsi dan kewenangan negara terhadap penguasaan sumber daya alam yang dimiliki, dengan demikian amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sehingga dari bunyi tersebut dapat di wujudkan.

Selain itu undang-undang No. 11 Tahun 1967 membuat perubahan secara mendasar tentang bagaimana ditiadakannya sistem kontrak antara karya bagi perusahaan pertambangan yang digantikan dengan sistem Izin Usaha pertambangan (IUP). UU minerba juga telah mengakomodasi kepentingan daerah

dengan memberikan kewenangan penuh terhadap pemerintah daerah untuk dapat menjalankan fungsi perencanaan pemberian IUP serta pembatasan luas wilayah dan jangka waktu izin usaha pertambangan. Kemunculan undang-undang Nomor 4 tahun 2009 sedikit banyak merubah sistem peraturan pada undang-undang No. 11 Tahun 1967 yang mana dapat menegaskan atas izin usaha yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya. Aktivitas usaha pertambangan pada hakikatnya tidak boleh memberikan penyebab suatu kerugian kepada pihak dan kelompok tertentu yang menjadi mayoritas (masyarakat umum), demikian juga alam yang menjadi sumber penyedia bahan tambang tidak boleh terganggu yang berdampak pada kerusakan alam dan lingkungan hidup.

Tidak hanya sampai disitu pemerintah yang seharusnya menjadi jembatan untuk bagaimana memberikan solusi serta mampu menjadi penengah terhadap konflik sosial yang terjadi di masyarakat malah seakan memberikan kebijakan yang dianggap tidak adil dan malah memperkeruh situasi yang ada. Dikutip dari pers walhi Bangka Belitung pada tahun 2018 didalam pengambilan kebijakan pemerintah provinsi Bangka Belitung berkordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bangka selatan mengeluarkan perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang menyatakan bahwa tiadanya ketegasan terhadap pengambilan keputusan dan dirasa mengabaikan dampak lingkungan dan sosial dimana didalam kebijakan tersebut dapat dilihat pada pasal 23, 24, 25 dan 26 dinyatakan terdapat 216 lokasi dengan total luasan wilayah mencapai 15.329 hektar di Bangka Belitung termasuk didalamnya Bangka selatan hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memperdulikan sumber daya alam yang terus digerus serta

pro terhadap kepada penambang, tanpa memikirkan stakeholder yang lain (Zulpriadi, 2018).

Kehidupan sosial yang diakibatkan terganggunya hak-hak dan kewajiban yang diakibatkan usaha tambang yang dapat menyebabkan hilangnya mata pencaharian dari komoditas lain. Hal tersebut di atur didalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yakni terutama hal yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan budaya, tentunya ini sangat bersentuhan dengan dampak dari pertambangan timah laut sehingga menyebabkan konflik horizontal antar masyarakat untuk bagaimana mendapatkan hak-hak kehidupan yang baik, aman dan sehat baik secara ekonomi dan secara lingkungan hidup yang baik, sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat penjelasan dari latar belakang masalah diatas maka dapat menjadi suatu acuan pada rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Politik dalam sosial ekologi pertambangan timah laut di Kabupaten Bangka Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat solusi terbaik dari pemerintah yang dilakukan untuk menanggapi dampak social ekologi pertambangan timah laut di kabupaten Bangka selatan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mejadi salah satu acuan bagi masyarakat dan pemerintah Bangka Selatan untuk bagaimana memberikan kebijakan yang adil dan maksimal dalam mengurus problem-problem yang terjadi di masyarakat kabupaten Bangka selatan.

1.4.2 Secara Praktis

1. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi sebagai suatu penelitian berbasis kesejahteraan sosial.
2. Bagi pemerintah dan masyarakat Bangka Selatan hasil dari penelitian tersebut, dapat dijadikan acuan sebagai informasi dan kinerja pemerintah kabupaten Bangka Selatan, serta masukan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang baik agar dapat menciptakan ekonomi sosial yang maju.

1.5. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini menggunakan 10 literatur rievew diambil dari artikel dan jurnal yang berbeda-beda dan saling berkaitan dengan dampak sosial ekologis

akibat pertambangan timah laut di Kabupaten Bangka Selatan. Tinjauan Pustaka ini bertujuan untuk peneliti mengetahui serta mencari informasi atau data guna mendapatkan perbedaan dari kajian-kajian sebelumnya, ringkasan literatur review sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul	Ringkasan
1.	Tanti Rismika, dan Eko Priyo Purnomo (2019)	Kebijakan Pengelolaan Ekosistem laut Akibat Pertambangan Timah Di Provinsi Bangka Belitung	Pada aktivitas pertambangan Laut yang semakin marah di kabupaten bangka saat ini merupakan akibat dari menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, terjadinya pengurangan sumberdaya alam dan lingkungan serta penerapan mutu lingkungan hidup yang masih sangat lemah. Permasalahan pemanfaatan dari sumber daya alam seperti Hutan, tanah, sumberdaya air, keaneka ragaman hayati dan sumber pesisir laut)., dan pencemaran lingkungan. Jadi setiap usaha atau sebuah kegiatan pertambangan dilaut haruslah memiliki izin lingkungan yang terarah sesuai peraturan yang ada.
2.	Tirta Anugerah, Arya Hadi Dharmawan dan Ivanovich Agusta (2021)	Dampak Penambangan Timah Laut Terhadap Sumber Penghidupan Rumah Tangga Nelayan Di Kabupaten Meranti.	Didalam penelitian ini hal yang dihasilkan ialah rumah tangga nelayan di Desa Tanjung Medang mengalami permasalahan utama akibat aktivitas pertambangan Timah laut. Diantaranya kekeruhan

No	Nama Penulis	Judul	Ringkasan
			<p>perairan laut. Hilangnya komoditas ikan penting dan abrasi. Selain itu kerentanan nakhah yang mengguncang mata pencarian nelayan direspon oleh rumah tangga nelayan tangsi dengan pemanfaatan alat tangkap tambahan dalam mengoptimalkan peluang ekonomi menjadi lebih baik mereka memaksimalkan anggota keluarga dalam mencari nakhah.</p>
3.	Eko Bagus Sholihin Pengantar: Nanang Indra Kurniawan (2021)	Merebut Laut: Kontestasi Wacana Lingkungan dan Tambang di Belitung Timur	<p>Pada penelitian ini penulis memberikan gambaran serta wacana dalam lingkungan dan tambang upaya untuk memberikan penjelasan tentang hegemoni dan mitos tambang sebagai bagian dari kesejahteraan, selain itu analisis wacana juga menghadirkan agenda Gerakan sosial dan lingkungan untuk dipahami masyarakat dalam konteks kesejahteraan pertambangan timah, kesejahteraan timah untuk siapa hari ini, didalam bab III kesejahteraan timah hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat yakni staff dan petinggi PT timah yang sangat dekat dalam pengelolaan timah sehingga masyarakat sadar bahwasannya timah menjadi</p>

No	Nama Penulis	Judul	Ringkasan
			komoditas strategis yang hanya bisa dikelola oleh perusahaan swasta dan negara serta masyarakat menyadari bahwa timah adalah sumberdaya yang lambat laut akan habis. Sehingga timah menimbulkan paradok ekonomi dan gerakan sosial.
4.	Nurul Listyani (2017)	Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Dikalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-hak Warga Negara	Pada penelitian ini didalam pembahasannya kegiatan pertambangan batubara sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya alam merupakan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang mengasu kepada hakekatnya tujuan pembangunan nasional yakni menunjang kesejahteraan masyarakat. Namun hal demikian rentan sekali dari resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga pemerintah sebagai konsekuensi dari hak menguasai negara atas dasar sumber daya alam wajib mengatur dan mengurus dan mengaswasi pengelolaan SDA.
5.	Wina Waniarti dan Muslihudin dan Sri Lestari (2022)s	Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh Kuningan Jawa Barat.	Hasil dari penelitian ini ialah didalam proses pertambangan pasir oleh PT. Anggun Jaya Mandiri di Desa Luragung Landeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan terdiri dari beberapa tahap pra

No	Nama Penulis	Judul	Ringkasan
			<p>kontruksi, kontruksi, operasi, produksi dan rencana pasca tambang. Didalam tahap pra konstruksi meliputi pembebasan lahan dan penerimaan tenaga kerja. Didalam tahap operasi meliputi perintisan, penebasan vegetasi dan pengupasan tanah serta pembangunan sarana pra sarana penambang. Disini dampak negatif yang ditimbulkan ialah kebisingan serta debu yang berterbangan, kerusakan infrastruktur jalan. Serta menumbulkan konflik antara penambang dan masyarakat.</p>
6.	Krisna Adrian, Winarno dan Rima Vien Permata Hartanto (2021)	Analisa Dampak Aktivitas Proyek Tambang Timah Di Perairan Laut Pulau Bangka Terhadap Hak Atas Pekerjaan Nelayan Traditional.	<p>Hasil pada penelitian ini ialah didalam proyek pertambangan timah di pulau bangka sangat berdampak pada hak atas pekerjaan nelayan tradisional dikawasan matras. Hal tersebut terlihat jelas dari dampak pekerjaan dan keamanan dalam bekerja nelayan tradisional. Dampak akses tersebut yaitu, pertama terhalangnya jalur mobilitas nelayan tradisional akibat keberadaan kapal-kapal isap produksi dan sisa limbah yang menyebabkan pendangkalan laut. Kedua, kerusakan ekosistem laut disekitar kapal-kapal isap produksi Timah.</p>

No	Nama Penulis	Judul	Ringkasan
			Ketiga, peningkatan kebutuhan modal bahan bakar dikarnakan harus menempuh jarak yang jauh untuk melaut. Keempat, kapasitas kapal nelayan yang tidak memungkinkan untuk melaut dengan jarak yang jauh. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan bernegara di Indonesia belum sepenuhnya inklusif.
7.	Rezka Rindra Monica, Dina Asrifah dan Suharwanto (2021)	Evaluasi Dampak pertambangan terhadap lingkungan disekitar kawasan pertambangan tras, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon	Pada penelitian ini dampak pertambangan yang di lakukan parameter untuk komponen abiotik meliputi udara (Kebisingan dan PM25) dan parameter komponen sosial menunjukkan dampak sangat kecil yang di tunjukan dengan skala 0, dalam upaya tersebut disini untuk mengurai kebisingan menggunakan tanaman sengon selain itu juga mampu meminimalisir partikel debu.
8.	Ibrahim, Dwi Haryadi, Nanang Wahyudin (2019)	Politik Ekologi dan Pelajaran dari Kasus Timah Bangka Belitung.	Pada penelitian ini memiliki hasil dimana moralitas lingkungan merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap perjalanan pertambangan hari ini, dimana kelompok kepentingan tidak lagi memikirkan sumberdaya yang berkelanjutan sehingga praktik pertambangan selalu menarik untuk digali, selain itu

No	Nama Penulis	Judul	Ringkasan
			<p>konflik sumberdaya alam, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dibangka Belitung. Tidak heran Ketika konflik criminal dan sebagainya pun ikut hadir, Bank dunia mengatakan bahwa 20 persen penikmat sumberdaya alam timah terbesar ialah mereka yang berpolitik dan orang yang sudah dianggap kaya serta memiliki kepentingan lebih 80 persen lainnya ialah masyarakat dibawahnya.</p>
9.	<p>Indra Ambalika Syari, Mohammad Agung Nugraha dan Mualimah Hudatwi (2022)</p>	<p>Dampak Penambangan Timah Di Laut Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Di Pulau Pemuja Dan Karang Malang Duyung, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>	<p>Dari hasil penelitian ini dimana kondisi terumbu karang yang berdampak akibat pertambangan laut sangat banyak dan signifikan yang mana total terumbu karang hidup sekitar 16,15%. Dalam hal ini lingkungan perairan pulau pemuja diestimasi masih terkena dampak dari kegiatan pertambangan timah yang didasari dengan tingginya tutupan lumpur dengan nilai 48,698% selain itu dapat dilihat bahwa terumbu karang yang rusak diakibatkan pertambangan timah laut berlangsung lama dapat dibuktikan dengan tingginya tutupan turf sekitar 19,967% hal tersebut merupakan dampak buruk terhadap lingkungan</p>

No	Nama Penulis	Judul	Ringkasan
			yang terjadi di perairan pulau pemuja. Dengan karang duyung dengan tutupan lumpur senilai 10,833% dengan sudah mengalami peningkatan dengan ditutupi sedikit karang hidup.
10.	Risdawati Ahmad, Ananda Yumnatus Syafira, Anif Fatimatus Sholichah, Lili Alvionita dan Abdul Kodir (2022) Vol 6 No 2	Derita Di Balik Tambang: Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Dalam Pertambangan Timah Di Bangka Belitung	Bedasarkan hasil penelitian tersebut, pertama munculnya dua kubu pada masyarakat lampur dalam merspon masalah perumahan yaitu kelompok pro terhadap tambang timah dengan adanya tambang Inkonvensional (TI) disini masyarakat bukan lagi sebagai penontondalam pemanfaatan sumber daya alamnya, namun mereka juga terlibat secara langsung, selanjutnya kelompok kontra yang mana masyarakat tersebut menganggap TI adalah penyumbang kerusakan ekologis terbesar di Bangka Belitung dan tidak ada benefit yang signifikan bagi kesejahteraan. Dengan klasifikasi kelompok pro merupakan pemodal, mafia dan penambang yang mendapatkan keuntungan lebih dan kelompok kontra para aktivis, akademis dan sebagaian pejabat Bangka Belitung.

Didalam kajian di atas ada beberapa hal yang diketahui bahwa dimana penelitian sebelumnya diambil dan menghasilkan gambaran tentang kerusakan lingkungan dan yang satunya menjelaskan bagaimana Gerakan sosial yang muncul. Hal tersebut dapat di simpulkan bahwa, didalam pengelolaan sumber daya alam Timah yang dilakukan diperairan laut Bangka dan Belitung, terdapat banyak sekali pro dan kontra diantaranya dari komoditas lain semisal nya nelayan yang terkena dampak secara langsung, selain itu, akibat limbah pembuangan seperti tailing sehingga merusak ekosistem laut serta lingkungan menjadikan pertambangan timah diperairan wajib dihentikan.

Selain itu, di dalam pertambangan hari ini masyarakat memahami bahwa sumber daya alam timah yang dikeruk hari ini merupakan sumber daya alam yang akan habis suatu saat, dengan begitu diprovinsi Bangka Belitung, wacana mengamaabil Kembali laut dengan dalih merusak lingkungan serta ekosistem laut menimbulkan beberapa Gerakan sosial yang didasari atas penyadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat menyadari bahwa timah hari ini untuk siapa, tidak semua masyarakat mendapat andil dari timah tersebut, hanya segelintir saja yang merasakan hasil dari timah tersebut, seperti staf Timah, petinggi PT. Timah, pejabat, serta mafia yang secara langsung berkecimpung sebagai pengelola Timah. Dari kesimpulan literatur rievew tersebut dengan maraknya konflik dan perubahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan penulis berpendapat bahwa belum adanya penelitian mengenai Sosio-ekologis di Kabupaten Bangka Selatan secara terarah, dari akibat aktivitas pertambangan laut pada tahu 2022-2023.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Konsep Politik Lingkungan

Lingkungan merupakan sebagai produk saling penguatan dari banyak susunan yang saling berinteraksi dan proses lebih dari pada suatu desain. Dengan itu, perbedaan yang fundamental antara tabiat manusia dan lingkungan bermakna bahwa pemahaman peran dari suatu masyarakat dalam system lingkungan memerlukan bukan hanya sekedar pemahaman bagaimana masyarakat telah berbuat dimasa lampau, tetapi juga apa yang mereka rencanakan untuk masa depan.

Peterson (2000), Mengatakan Bahwa politik lingkungan merupakan suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, antar kelompok yang berbeda-beda di dalam kehidupan masyarakat dalam skala individu lokal kepada nasional secara menyeluruh.

Selain itu menurut Bryant (1992), Politik lingkungan boleh di definisikan sebagai usaha untuk memahami sumber-sumber politik, kondisi dan menjadi suatu jaringan dari pergantian lingkungan. Bryant mengkrucutkan kajian politik lingkungannya dengan meneliti operasional dalam pengelolaan hutan dalam kasus di Indonesia. Dari definisi tersebut, dijelaskan bahwa definisi Bryant yang menekankan politik adalah bagian utama dari politik lingkungan, yang berbasis aspek pembangunan dan berwawasan pelestarian lingkungan. Pertama, bahwa tekanan politik ekonomi dari pemerintahan soeharto mewarnai secara mendalam dalam pengelolaan hutan sejak tiga decade pemerintahannya (1966-1998). Kedua,

implementasi dari tekanan politik dan ekonomi atas perspektif lingkungan telah diabaikan oleh birokrat kehutanan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan lainnya.

Didalam politik lingkungan pengamatan skala sosial lingkungan yang berbeda juga diperlukan, politik lingkungan menjelaskan sekurangnya tiga penelitian area yang berbeda. Pertama penelitian kedalam sumber yang kontekstual dimana perubahan lingkungan yang menguji pengaruh lingkungan secara umum pada suatu negara, antar negara dan kapitalisme global. Kedua, area penelitian mencari tahu lokasi dari aspek-aspek khusus yang saling berhubungan tentang perubahan lingkungan, yaitu dengan mempelajari suatu konflik atas akses sumber lingkungan. Ilmuwan memperoleh pandangan bagaimana kontekstual pelaku yang mempengaruhi atas kondisi sosio lingkungan yang khusus, hubungan dan menekankan perjuangan lokasi yang khusus atas lingkungan. Mengambil baik sejarah maupun dinamika konflik yang terjadi di era lingkungan tersebut. Ketiga, penelitian ini menjelaskan bahwa jejaring politik dari perubahan lingkungan atas hubungan sosio-ekonomi politik.

Michael Watts (2000) berpendapat bahwa, *“Political ecology is the complex relations between nature and society through a careful analysis of what one might call the forms of access and control over resources and their implications for environmental health and sustainable livelihoods.”*

Politik Lingkungan merupakan cara memahami hubungan kompleks antara alam dan masyarakat dengan analisis dari apa yang disebut bentuk akses dan kontrol atas

sumber daya dan implikasinya terhadap kesehatan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan.

Selain itu menurut Lamont C. Hempel (1996) political Ecology “*the study of interdependence among political units and of interrelationships between political units and their environment, concerned with the political consequences of environmental change, with goals to explore community level and regional political action in the global sphere, in response to local and regional and scarcity.*” Kajian tentang ketergantungan antara unit politik dan keterkaitan antara unit politik dengan lingkungan, yang berhubungan dengan konsekuensi politik dari perubahan lingkungan. Tujuannya untuk menggali dan menjelaskan tingkatan komunitas dan aksi politik regional dalam lingkup global, reaksi atas degradasi dan kelangkaan pada lokal dan regional.

The study of human-environment interactions has a long history from different disciplines. Political Ecology (PE) is an emerging interinterdisciplinary approach to study humanenvironment interactions with a critical lens. In general, it is focused on how power inequalities relate to environmental changes, and to the distribution of their costs and benefits. A central feature of political ecology is the politicization of environmental problems. This means that environmental problems are seen as problems of distribution and the exercise of political and economic power, marked by conflicts over alternative futures and clashes between alternative values and imaginaries. Recognizing this means that environmental problems one has to attend to political and economic problems: problems of democracy, of economy, of ideology, etc.

Kajian mengenai interaksi manusia dan lingkungan memiliki sejarah Panjang dari berbagai disiplin ilmu. Dimana politik lingkungan merupakan

pendekatan interdisiplin untuk meneliti hubungan manusia dan lingkungan dengan kaca mata yang kritis. Secara universal fokus pada ketiksetaraan kekuasaan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, dan distribusi kerugian dan keuntungan. Dimana yang wajib diketahui adalah karakteristik utama politik lingkungan adalah politisasi permasalahan lingkungan. Ini berarti bahwa permasalahan lingkungan dilihat sebagai permasalahan distribusi dan pelaksanaan kekuatan politik dan ekonomi, ditandai dengan permasalahan konflik atas alternatif masa depan dan perselisihan antara nilai, menyadari hal ini berarti bahwa lingkungan merupakan suatu yang harus dihadapi politik dan ekonomi, demokrasi, ekonomi, ideologi dan sebagainya.

Lingkungan memiliki sejumlah karakteristik khas yang idealnya dapat dijadikan titik rujuk bagi politik sebagai instrument pengatur kepentingan bersama. Tiga karakteristik dasar lingkungan dapat diidentifikasi, pertama, watak lingkungan sebagai sebuah kesatuan system melintasi sekat-sekat administrasi pemerintahan politik. Lingkungan tidak pernah setia pada dan tidak pernah dipagai oleh ruang yang diciptakan melalui politik. Kedua, lingkungan melekat didalamnya kepentingan saling subyektif dari manusia sebagai makhluk, terlepas dari ruang politik dan terbebas dari penjara waktu. Setiap individu, membutuhkan lingkungan sebagai ruang kebutuhan hari ini yang tidak bisa ditunda pemenuhannya dan sekaligus sebagai ruang kebutuhan dimasa depan yang tidak dapat dipercepat. Lingkungan ialah ruang kita sebagai makhluk manusia bukan sekedar ruang untuk hari ini, tapi sekaligus sebagai ruang dimasa yang akan datang.

Dalam konteks itu, lingkungan memiliki variasi makna, mulai dari posisinya sebagai ruang ekonomi, ruang kultural bahkan hingga pada ruang dalam makna fisikalnya. Ketiga, daya menghukum lingkungan yang timbul sebagai akibat dari pengabaian manusia atas lingkungan punya sifat yang sangat khas, yakni indiskriminatif. Sehingga menimbulkan bencana kita perlakukan alam atau lingkungan secara wajar melanda siapa saja tanpa memperdulikan kelas sosial, kekayaan, asal-usul, agama dan berbagai macam kategori yang menjadi pembada didalam kehidupan manusia.

1.6.2 Gerakan Sosial

Pada referensi sosiologis dikenal adanya berbagai macam pendapat yang dikemukakan oleh para sosiolog dengan pengertian yang dimaksud dengan Gerakan sosial. Cohen (1983) misalnya ia menjelaskan bahwa Gerakan sosial merupakan suatu Gerakan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang bersifat terorganisir dengan tujuan untuk merubah atau mempertahankan sesuatu unsur tertentu dalam masyarakat luas. Selain itu, Cohen menyampaikan beberapa ciri dari pada suatu Gerakan sosial yang diantaranya: adanya suatu tujuan yang ingin dicapai (sasaran), terencana serta terdapat suatu ideologi.

Sementara itu Zurcher dan Snow dalam buku Michener dan Delamater (1999) merumuskan definisi Gerakan sosial sebagai kegiatan yang bersifat kolektif yang mengekspresikan tingkat kepedulian yang tinggi tentang beberapa isu tertentu. Kemudian menurut Gusfield dan Allen (1980) menanggapi bahwa apabila suatu

Gerakan sosial sebagai kegiatan dan kepercayaan masyarakat akan harapan adanya sebuah perubahan dari beberapa aspek dalam kondisi sosial. Dari beberapa definisi Gerakan sosial tersebut sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa Gerakan sosial merupakan suatu Gerakan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang sifatnya terencana dan terorganisi dengan tujuan mencapai tujuan tertentu sesuai dengan misi dari pada suatu Gerakan tersebut. Didalam Gerakan sosial terdapat berbagai macam tipe yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai tujuan perubahannya.

Menurut Cohen (1983), yang membagi jenis Gerakan sosial tersebut kedalam berbagai macamnya, *Pertama*, Gerakan Ekspresif, dalam Gerakan yang sudah maju dan modern individu untuk mengungkapkan (mengekspresikan) berbagai macam keinginan dan dapat perhatian dan simpati publik. *Kedua*, Gerakan regresif, ada pun tipe Gerakan sosial ini sengaja dilakukan oleh kelompok orang dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan sebelumnya. *Ketiga*, Gerakan progresif, dimana Gerakan ini merupakan keterlibatan dasar dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan kelompok tertentu dalam masyarakat. *Keempat*, Gerakan reformis, tipe ini merupakan Gerakan sosial berorientasi pada terciptanya perubahan dan pembaruan aspek tertentu dalam masyarakat.

Kelima, Gerakan revolusioner, tidak seperti halnya Gerakan reformasi, yang hanya menuntut dilakukannya perubahan terhadap aspek tertentu dalam masyarakat maka dalam Gerakan sosial yang sifatnya revolusioner ini justru menuntut lebih jauh hingga dilakukannya perubahan bersifat total dan radikal terhadap seluruh aspek kehidupan manusia dan tatanan sosial yang ada. *Keenam*, Gerakan utopian

dalam konteks Gerakan ini perlu diketahui bahwa sekelompok orang dengan tujuan untuk membentuk suatu lingkungan yang dianggap ideal dan baik bagi mereka. *Ketujuh*, Gerakan migrasi, pada dasarnya mereka yang terlobat dalam Gerakan ini merasa tidak begitu puas dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi mereka sekarang sehingga mereka memutuskan untuk berpindah kesuatu tempat atau wilayah yang lain dengan harapan memiliki kehidupan sosial ekonomi yang mempuni.

1.8 Definiasi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pengertian antara konsep suatu yang hendak diteliti. Berdasarkan judul yang tertera diatas yaitu dampak Sosial Ekologi Pertambangan Timah Laut di Kabupaten Bangka Selatan, Maka dari pada itu penulis membagikan suatu konsep beberapa baian sebagai berikut:

1. Politik Lingkungan (Ecology Politic) adalah sebuah studi yang digunakan dalam memahami hubungan rumit antara masyarakat dan lingkungan disekitarnya melalui analisis kehati-hatian berdasarkan apa yang dimaknai bentuk-bentuk akses dan control.
2. Gerakan Sosial (Social Movement) adalah sebuah bentuk aksi bersama dengan tujuan yang konfliktual menjelaskan dengan lawan social atau lawan politik tertentu, dengan dilaksanakan dalam jenjaring lintas kelembagaan yang solit oleh para actor yang diikat sebuah solidaritas dan

identitas bersama yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan yang telah ada, serta ingin mencapai tujuan bersama.

3. Aktivitas Pertambangan Timah laut adalah merupakan aktivitas masyarakat dalam penguatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menggali dan mengebor tanah untuk bagaimana mengambil sumber daya alam di Kabupaten Bangka Selatan.

1.9 Definisi Operasional

Operasional merupakan suatu petunjuk bagaimana suatu variable dapat diamati dan diukur, artinya dapat dijadikan suatu tolak ukur dalam melakukan suatu penelitian dalam mengobservasi atau mengukur sehingga dapat dijadikan sebuah contoh bagi orang lain. Berikut merupakan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel. 1. Indikator Teori Politik Lingkungan Wats

Konsep	Variabel	Indikator
Politik Lingkungan	Akses (access)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya akses kepada investor tambang akibat izin yang diberikan oleh Pemkab Bangka Selatan. 2. Lemahnya suatu perekonomian menjadi suatu penyebab rakyat mengakses tambang tidak berizin tambang inkonvensional (TI).
	Kontrol (control)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya control penuh dari masyarakat kepada kebijakan dan pertambangan timah laut.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya perumusan penolakan dari organisasi mahasiswa, kepemudaan dan masyarakat nelayan 3. Terdapat gerakan sosial dari organisasi kepemudaan sosial, dan mahasiswa, masyarakat kontra pertambangan untuk mengontrol kebijakan.
	Kondisi Sosial (Social conditions)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat permasalahan social yang terjadi di masyarakat 2. Adanya patronase yang terjadi dikalangan aparat, pejabat pemerintah daerah tersebut.

1.10. Metode Penelitian

1.10.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dalam pendekatannya melalui deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini peneliti mencoba mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut (Suwendra, 2018) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan berupa lisan atau kata-kata dari data deskriptif dengan mengamati perilaku yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Selain itu (Nugrahani, 2014) Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penyajian data dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar atau kalimat yang memunculkan pemahaman yang nyata dengan deskripsi kalimat dengan mendalami secara rinci dan lengkap menjelaskan segala hal bentuk suatu situasi dan keadaan yang sebenarnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu memakai pola gabungan dan kemudian digabungkan kelanjutannya dengan sebuah proses Analisa data yang bersifat induktif. Penelitian ini melakukan penelitian yang menggambarkan kejadian atau masalah di lapangan yaitu dengan melihat suatu study kasus pada dampak lingkungan dan sosial pada aktivitas pertambangan timah laut di Kabupaten Bangka Selatan.

1.10.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini ialah tempat terjadinya pertambangan timah lepas pantai disekitaran laut Kabupaten Bangka Selatan.

1.10.3 Data dan Sumber data

Sumber data yang diambil pada penelitian ini, guna memperoleh data-data yang langsung berhubungan dengan penelitian dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu;

1.10.3.1 Data Primer

Data primer datang dari sebuah observasi yang langsung dilakukan oleh peneliti dari narasumber tangan pertama yang menyangkut pendapat dari responden tentang variable penelitian. Yang secara langsung menjadi sebuah objek penelitian yaitu wawancara langsung kepada pihak pemerintah daerah, masyarakat penambang, dan masyarakat dari komunitas yang secara langsung mendapat

dampak tersebut. Guna melihat bagaimana dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan laut di Kabupaten Bangka Selatan.

1.10.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang didapatkan dari berbagai macam sumber sehingga bisa saja sifatnya tidak faktual. Data sekunder didalam penelitian ini bisa saja dihasilkan dari buku-buku, informasi dari internet, arsip-arsip dan dokumen yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya terhadap variable penelitian ini.

1.10.4 Unit Analisis

Unit analisis dapat diartikan sebagai fokus penelitian yang ingin diteliti oleh penulis guna unit analisis dalam penelitian ini untuk menjawab semua permasalahan yang akan diteliti. Sebab dari pada itu unit analisis dari sebuah penelitian ini ialah bagaimana dampak lingkungan dan sosial terhadap aktivitas pertambangan laut di Bangka Selatan.

1.10.5 Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini merupakan penjabaran sejauh mana dampak lingkungan dan sosial yang terhadap aktivitas pertambangan laut di Kabupaten

Bangka Selatan saat ini. Yang mana banyak nya suatu permasalahan baru yang muncul didalam hal tersebut.

1.10.6. Teknik Pengumpulan data

Didalam penelitian ini yang mana data dan informasi di dapatkan dari suatu objek penelitian yang di teliti. Maka ada beberapa Teknik pengumpulan data yang diambil untuk disajikan secara utuh tanpa ada tambahan maupun pengurangan informasi hal-hal yang berkaitan dengan sebuah objek penelitian. Maka Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

1.10.6.1 Studi Pustaka

Didalam study Pustaka diaman mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada dengan cara yang ilmiah salah satunya dengan study Pustaka. Dimana study Pustaka merupakan Teknik pengumpulan data atau informasi dengan menelaah dari sumber yang didapat seperti jurnal ilmiah, referensi buku, ensiklopedia, kaerangan ilmiah serta suatu sumber lain nya yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk digital yang relevan dengan suatu objek diteliti (Arikunto, 2006). Maka dalam penelitian ini, studi Pustaka yang sangat relevan ialah suatu hal yang bersangkutan dengan dampak sosial dan ekologi atas aktivitas pertambangan laut dapat dijadikan sebagai bahan studi Pustaka.

1.10.6.2 Wawancara

Disini wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan pada narasumber menggunakan sistem lisan dan menjawab pula: Informan yang dituju dalam penelitian ini ialah:

Tabel. 2. Daftar Narasumber dan Metode Wawancara Pada Penelitian.

No.	Nama	Jabatan	Organisasi	Metode Wawancara
1.	Bpk. Joni Zuhri	Ketua	Paguyuban Nelayan Bangka Selatan (Batu Perahu).	Telepon
2.	Bpk. Jesix Amundian	Direktu Daerah	Walhi Bangka Belitung	Zoom Meeting
3.	Bpk. Musani	Anggota Komisi III	DPRD Kab. Bangka Selatan	Zoom Meeting
4.	Bpk. Mirzah	masyarakat (Nelayan)	Paguyuban Nelayan Bangka Selatan (Batu Perahu).	Telpon
5.	Sdr. Tofik Hermawan	Kordinator	Aliansi Mahasiswa Bangka Selatan Bergerak.	Zoom Meeting
6.	Sdr. Jodi Setiawan	Sekretaris	Karang Taruna Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.	Zoom Meeting

1.10.6.3 Observasi

Observasi merupakan suatu metode yang akurat dan mudah untuk melakukan pengumpulan data dan informasi secara langsung yang bertujuan untuk mencari kebenaran akan sesuatu untuk dipahami dalam penelitian ini. Selain itu observasi merupakan salah satu tolak ukur yang banyak digunakan

untuk mengukur prose dan tingkah laku individu yang akan diteliti dan diamati. Dalam penelitian ini penulis sebagai peneliti secara langsung ingin melihat sejauh mana dampak lingkungan dan sosial yang di peroleh akibat hasil aktivitas tambang timah laut serta bagaimana solusi dari pemerintah yang diberikan dari permasalahan tersebut untuk menguraikan dampak yang lebih besar lagi terjadi kedepannya.

1.10.6.4 Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif yang mana menganalisa dokumen yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat digambarkan dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lain. Maka dalam metode ini peneliti dapat mengambil data atau catatan yang relevan dengan penelitian sebagai contoh: gambaran keadaan lokasi penambang, dampak sosial Yang ditimbulkan secara langsung, melalui catatan dan foto-foto yang langsung diambil dari lapangan. Metode ini bisa dikatakan sebagai pelengkap data yang belum dapat melalui daftar Pustaka, wawancara serta observasi yang di lakukan oleh peneliti.

1.10.7 Teknik Analisis Data

Dalam mencapai tujuan penelitian yang ingin dicapai maka penulis akan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yang telah didapatkan seperti daftar Pustaka, wawancara, dokumentasi dan observasi. Sehingga dapat dijadikan hal pokok dari penelitian ini dapat dikendalikan oleh

penulis sebagai tanggung jawab dari sebuah penelitian dengan disusun secara sistematis.

Pada hal tersebut disini penulis menggunakan Analisa data kualitatif, dimana data yang didapatkan dianalisa dengan metode deskriptif dengan cara berfikir induktif yaitu dengan dimulai dari suatu fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara mempelajari proses dan penemuan yang terjadi, mencatat dan menganalisa serta menafsirkan lalu dituangkan dalam laporan barulah menarik kesimpulan pada proses tersebut.

Dalam penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Becklin, didalam kutipan Muli J. Mulong (1991), Analisa data kualitatif merupakan sebuah upaya bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data pada suatu unit yang dapat dikelola dengan menggabungkan, serta mencari dan menemukan pola. Dengan demikian keputusan hal penting apa yang dapat diberikan kepada orang banyak.

Disini Langkah penulis dalam menganalisa data adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data

Dalam hal pengelolaan data guna mempermudah penulis mendapatkan sebuah gambaran yang jelas dalam sebuah penelitiannya dengan banyak data yang didapatkan dan memilih data tersebut atau perlu adanya sesuatu yang disebut dengan metode reduksi data atau mereduksi data berarti merangkum data yang sudah kita dapatkan dengan demikian akan memfokuskan penulis

pada sebuah hal penting dan menemukan pola penelitian agar dapat mudah dipahami oleh orang lain.

2. Penyajian data

Pada penyajian data, dimana Langkah reduksi atau mereduksi sebuah data maka Langkah berikutnya adalah menyajikan data, didalam penyajian data dapat dilakukn dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, atau sebuah hubungan antar kategori dan sejenisnya. Tujuan dari metode ini untuk memudahkan dan memahami yang terjadi, menrencanakan peran kerja berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi data

Didalam verifikasi data dimana merupakan suatu metode penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah valid dan menunjukkan bukti-bukti valid serta konsistensi saat melakukan penelitian.